

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adrianto Dwi Nugroho. 2010. *Hukum Pidana Pajak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Akhmad Syarifudin. 2018. *Buku Ajar : Perpajakan*. Kebumen; STIE Putra Bangsa.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas – Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education.
- Andi Nurfitriana Rais. *et al.* 2023. *Barang Rampasan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta; Karya Bakti Makmur.
- A. Ridwan Halim. 1987. *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta; Kencana.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka.
- Eddy O. S. Hiariej. 2016. *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka.
- _____. 2018. *Penegakkan Hukum Pidana Pajak: Ultimum Remedium ataukah Primum Remedium?*. Yogyakarta.
- Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Hans Kelsen. 2011. *General Theory of Law and State*, (terjemahan Rasisul Muttaqien). Bandung : Nusa Media.
- IGM Nurdjana. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Irwansyah. 2020. *Kajian Ilmu Hukum*. Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- Johni Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana

- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta; KPK.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung; PT Alumni.
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses dan Teknik Pembentukannya)*. Yogyakarta; Kanisius.
- Marwan Effendi. 2010. *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*. Jakarta; Timpani.
- M. Haryanto. 2017. *Bahan Ajar Buku Hukum Pidana*. Salatiga; Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
- Mispansyah dan Amir Ilyas. 2016. *Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin dan Yurisprudensi*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta; Bina Aksara.
- _____. 2015. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Cet. IX. Jakarta; Rineka Cipta.
- Mohammad Ekaputra. 2015. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Edisi 2*. Medan; Usu Press.
- Muhammad Djafar Saidi. 2018. *Pembaruan Hukum Pajak*. Cet. VIII. Depok; PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2013. *Hukum Acara Peradilan Pajak*. Depok; PT Raja Grafindo Persada.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahmanuddin Tomalili. 2012. *Hukum Pidana*. Yogyakarta; CV. Budi Utama.
- Reda Manthovani. 2017. *Kumpulan Catatan Hukum*. Jakarta; Bhuana Ilmu Populer.
- Roy Riady. Hasanul Mulkan. dan Serlika Aprita. 2024. *Tindak Pidana Perpajakan*. Tasikmalaya; Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung; Citra Aditya Bakti.

Suhatrizal. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Diklat. Universitas Medan Area Fakultas Hukum.

Soedjono Dirjosisworo. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bandung; PT Balai Pustaka.

Sotarduga Sihombing dan Susy Alestriani Sibagariang. 2020. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

S. Wojowasito dan W.J.S Poerwadarminta. Kamus Lengkap Inggris – Indonesia, Indoensia Inggris, Bandung: Hasta.

Syaiful Bahri (Ed). 2022. *Pepajakan*. Bandung: Media Sains Indonesia.

Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta; Rajawali Pers.

W.J.S. Poerwadarminta. 1987. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta; Balai Pustaka diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Yapiter Marpi. 2020. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Tasikmalaya; Zona Media Mandiri.

Disertasi :

Budi Parmono. 2011. *Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Jurnal :

Agus Puji Priyono dan Antonia Intarti. 2019. *Penegakkan Hukum Sanksi Pidana Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Dikaitkan dengan Asas Ultimum Remedium*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 18 No 1. Fakultas Hukum Univeristas Langlangbuana. Bandung.

Aryo Fadlian. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jurnal Hukum Positium. Vol. 5 No. 2. Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa. Karawang.

Douglas Jhon Fiter. Alpi Sahari. dan Adi Mansar. *Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaaan Negeri Deli Serdang)*. Jurnal Kajian Hukum. Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

- Herianto Yudhistiro Wibowo. 2019. *Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)*. Jurnal Idea Hukum. Vol. 5 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.
- Madya Daka Lelana. 2020. *Analisis Yuridis Surat Dakwaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tentang Tindak Pidana Perjudian*. Jurnal Hukum. Vol. 7 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- M. Rikhardus Joka. 2023. *Tindak Pidana Perpajakan Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Menurut Undang - Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Vol. 1 No. 2. Jurnal Justice Voice. Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Jatiwaringin.
- RB Budi Prastowo. 2006. Delik Formil/Materiil Sifat melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Pro Justitia. Volume 24 Nomor 23.
- Riky Sembiring. 2018. Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. Jurnal Aktual Justice. Vol. 3 No. 2. Pascasarjana Universitas Ngurahrai. Denpasar.
- Rizkika Maharani Loventa. 2021. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn). Jurnal Combines. Vol. 1 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Batam.
- Siti Rahmawati. 2017. Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perintah Perjalanan Dinas Yang Berimplikasi Korupsi. Jurnal Ius. Vol. 5 No. 3. Fakultas Hukum Universitas Mataram. Mataram.
- Zainab Ompu Jainah. 2011. Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional). Jurnal Keadilan Progresif. Vol. 2 No. 2. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Lampung.

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262).

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566)

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984).

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740).

Undang – Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108).

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

Sumber Internet :

Ensiklopedia Indonesia. 1983. Jilid 4. Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve dan Elsevier *Publishing Project*.

Syed Husein Alatas. 1987. *Korupsi Sebab Sifat dan Fungsi*. Jakarta LP3ES.

ajak.go.id. *Ketentuan dalam Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, <https://www.pajak.go.id/id/uu-hpp>, diakses pada tanggal 20 Februari 2025.

Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan empat lingkungan seluruh Indonesia. 2007. Makassar. 2 September.